

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badrulzaman, M. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Marilang. (2017). *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, A. Q. S. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, P. (2016). *Asas-asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*. Semarang: UNDIP.
- Prodjodikoro, W. (2016). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Rusli, H. (2017). *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saragih, D. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Satrio, J. (2022). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (2016). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Seto, S. (2017). *Manajemen Apoteker*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S. (2018a). *Aspek Hukum Apotek dan Apoteker*. Bandung: Mandar Maju.

- Soekanto, S. (2018b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2016). *Hukum Perjanjian dan Perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunandar, T. (2019). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/Kep/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

C. Sumber Lain

- Maulana, Cecep. 2020. "Penerapan Standar Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 di Apotek Kecamatan Salaman." *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2): 41-49.
- Muhammad, Fadel, dan Endang Wahyati Yustina. 2022. "Perlindungan Hukum Pasien atas Ketidakhadiran Apoteker dalam Penyelenggaraan Apotek Berdasarkan Asas Profesionalitas." *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(1): 80-95.
- Putra, I Kadek Dwi Semara, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2021. "Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Lisan antara Pemilik Sarana Apotek dengan

Apoteker Pengelola Apotek.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(4): 605-618.

Rinaldi, Ahmad, 2023. “Analisis Hukum Pendelegasian Wewenang Kefarmasian Kepada Tenaga Non-Kefarmasian Saat Apoteker Absen.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(2): 295-305.

Nurhaliza, Siti, Heru Sunardi, dan Rinaldi. 2022. “Efektivitas Pasal 3 Permenkes No. 9 Tahun 2017 Terhadap Kehadiran Fisik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 3(1): 12-25.